

# **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

**Yuliyanti, Muhammad Titan Terzaqhi**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Bina Darma Palembang Indonesia

Correspondence: yuli20400@gmail.com, mtitant4@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Puskesmas Sukajadi sejumlah 91 responden. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi *software statistical program for social science* (SPSS) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK), dan Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK).

**Kata kunci :** akuntabilitas., transparansi.

**Abstract.** The purpose of this study was to determine the effect of accountability and transparency on the management of health operational assistance funds (BOK). This research uses quantitative methods. The population in this study were all employees of the Sukajadi Health Center with a total of 91 respondents. Sampling using saturated sampling. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using the software application program statistical program of social science (SPSS) version 26. The results of this study indicate that accountability has a positive and significant influence on the management of health operational assistance funds (BOK), and transparency has a positive and significant influence on the management of health operational assistance funds (BOK).

**Keywords :** accountability, transparency

## **PENDAHULUAN**

Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah kualitas pelayanan dasar untuk warga negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif (Saptawan, 2018). Masyarakat sendiri sebagai penerima layanan dari pemerintah juga berhak juga untuk mengetahui kinerja yang dilakukan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Hughes, 2017) yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah seungguhnya dibuat dan diadakan oleh pihak masyarakat, maka dari itu para pegawai dalam lembaga pemerintahan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik, bentuk pertanggungjawaban para pegawai pemerintahan

mencakup semua prilaku, sikap, tindakan kerja dan sebagai keputusan yang dibuat dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh publik.

Kementerian kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan yang dilakukan secara berkesinambungan salah satunya adalah dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dengan adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diharapkan dapat meningkatkan dan mendorong pembangunan kesehatan di indonesia. Peluncuran skema Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dikarenakan fungsi puskesmas belum berjalan secara optimal, hal ini dapat lihat dari fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada masyarakat, dan sebagai pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. Pada pertengahan tahun 2010, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya membantu pemerintah daerah agar mencapai target nasional dibidang kesehatan memerlukan

sebuah program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) program dan aturan ini memiliki tingkat keunggulan yang tinggi pada kementerian kesehatan. Dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kementerian kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian disalurkan kepada puskesmas melalui mekanisme pembantuan.

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Kesehatan menuju *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan promotif dan preventif. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) anggaran harus memadahi maka hal tersebut harus bersifat suplemen terutama upaya promotif dan preventif. Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Kesehatan menuju *Millennium Development Goals* (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan promotif dan preventif. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) anggaran harus memadahi maka hal tersebut harus bersifat suplemen terutama upaya promotif dan preventif.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2021 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan salah satu dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat, penurunan angka kematian ibu dan anak, dan memberikan malnutrisi pengelolaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, prinsip tata kelola yang baik harus akuntabel dan transparan. Jika prinsip akuntabel dan transparan ditetapkan dengan baik maka anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan sasaran sehingga dapat meningkatkan pelayanan

masyarakat, namun kebanyakan puskesmas tidak menerapkan prinsip akuntabel dan transparan dalam mengelola anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut sehingga penggunaanya kurang efektif. Segi efektivitas dukungan dana operasional APBD ditarik untuk digantikan dengan BOK dan adanya beberapa kabupaten/kota yang mengutamakan program-program yang menyerap APBD lebih dahulu di bandingkan dengan program BOK akibatnya dalam pencapaian pelaksanaan program Bantuan BOK menjadi tidak maksimal, dari segi akuntabilitas dan transparansi terdapat banyak kendala antara lain kualitas *plan of action* (POA) yang tersusun belum standar, terbatasnya jumlah tenaga pengelola keuangan sehingga penggabungan pengelolaan BOK dengan jaminan kesehatan masyarakat menjadi beban dan membingungkan, dominasi program tertentu dalam penggunaan dana BOK yang disebabkan kurangnya koordinasi antar program.

Puskesmas merupakan salah satu fasilias pelayanan kesehatan, yang lebih mengutamakan promotive dan preventif, dalam anggaran pemerintah puskesmas ini mendapatkan anggaran dana BOK yang kemudian wajib melaksanakan semua program yang dianggarkan dan menyusun laporan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah pusat (kementerian kesehatan), sehingga perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dana BOK. Berdasarkan latar belakang diatas, akuntabilitas dan transparansi menjadi pokok dikarenakan untuk kesinambungan bantuan itu sendiri. Pengelolaan keuangan BOK puskesmas diatur dalam permenkes No. 11 Tahun 2015 yang dalam pengelolaannya memuat tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pembukuan, dan pelaporan. Namun, dalam prakteknya masih ada kendala dalam pengelolaan keuangan BOK di puskesmas yaitu pada tahap pelaporan, dimana dalam pelaporan harus membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) atau laporan pemanfaatan dana BOK masih tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan dari tim pengeola BOK masih ada yang tidak tahu aturan yang mengatur pengelolaan BOK.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data berupa angka-angka. Dalam penelitian ini menggunakan data primer.

Populasi yang digunakan yaitu seluruh pegawai puskesmas Sukajadi. Pengambilan sampel penelitian menggunakan sampling jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasinya relative kecil. Persamaan dari regresi linear berganda dengan

dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2018):  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Keterangan :  $Y$  = Pengelolaan Dana BOK;  $a$  = Konstanta;  $b$  = Koefisien Regresi;  $X_1$  = Akuntabilitas;  $X_2$  = Transparansi;  $e$  = Error

## HASIL

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

				Unstandardized Residual
N				91
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean		.0000000
		Std. Deviation		1.77904023
Most Extreme Differences	Absolute			.109
	Positive			.109
	Negative			-.046
Test Statistic				.109
Asymp. Sig. (2-tailed)				.010 <sup>c</sup>

Sumber: data olahan

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistic non-parametrik *kolmogrov-smirnov*. Menurut Ghozali (2018) uji ini digunakan untuk menentukan apakah data yang telah diikumpulkan dalam suatu kelompok atau variabel berdistribusi secara normal atau tidak. Data yang dianggap baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Berdasarkan Tabel 1 dapat terlihat bahwa hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan  $0,10 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian ini bersifat normal.

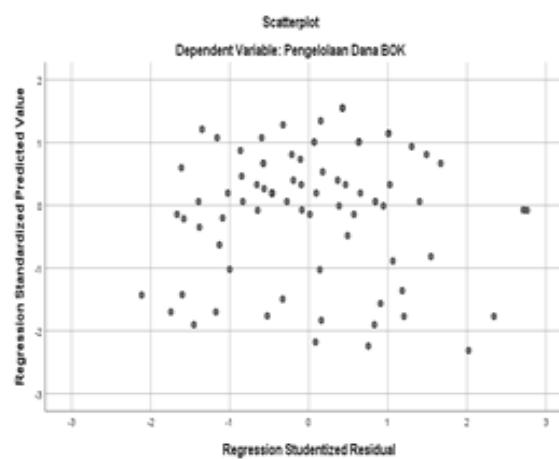
**Tabel 2**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constaant		
Akuntabilitas	.406	2.460
Transparansi	.406	2.460

Sumber: data olahan

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat koreksi yang tinggi antara variabel bebas dalam sebuah model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel bebas, maka dapat menyebabkan gangguan dalam pengukuran pengaruh variabel tersebut terhadap variabel terkait. Terdapat beberapa alat statistik yang umum digunakan untuk menguji adanya

multikolinearitas, di antaranya adalah sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai tolerance akuntabilitas  $0,406 > 0,10$  dan nilai vif akuntabilitas sebesar  $2,460 < 10,000$  maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas. Dan diketahui nilai tolerance transparansi  $0,406 > 0,10$  dan nilai vif sebesar  $2,460 < 10,000$  maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas.



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
**Uji Heterokedatisitas**

Salah satu metode untuk mendeteksi heterokedatisitas adalah melalui pengamatan Grafik scatterplot. Berdasarkan Gambar 1 dapat

dilihat bahwa grafik *scatterplot* yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah adanya terjadi heteroskedastisitas. Ciri-ciri tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas

yaitu tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar angka 0 pada sumbu y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

**Tabel 3**  
**Uji R2 (Koefisien Determinasi)**

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.817 <sup>a</sup>	.667	.660	1.799	.667	88.293	2	88	.000	2.029

Sumber: data olahan

Berdasarkan *output* diketahui nilai R Square sebesar 0,667, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 66,7%. Koefisien determinasi dengan menggunakan adjusted R<sup>2</sup> diperoleh nilai sebesar 0,667 artinya sebesar 66,7% variabel akuntabilitas dan transparansi mampu mempengaruhi variabel pengelolaan dana BOK secara signifikan, sedangkan sisanya 33,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Sedangkan Tabel 4

diketahui nilai sig pengaruh variabel akuntabilitas (X1) dan variabel transparansi (X2) secara siluman terhadap variabel pengelolaan dana BOK (Y) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F-hitung 88,293 > F-Tabel 3,10, sehingga dapat ditarik bahwa uji signifikan simultan diterima yang berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap variabel pengelolaan dana BOK (Y).

**Tabel 4**  
**Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	571.591	2	285.795	88.293	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	284.849	88	3.237		
Total	856.440	90			

Sumber: data olahan

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Partial (uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.166	1.147		6.250	.000		
Akuntabilitas	.516	.112		4.622	.000	.406	2.460
Transparansi	.339	.077		4.383	.000	.406	2.460

Sumber: data olahan

Tabel 5 pada model regresi, diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel akuntabilitas (X1) terhadap variabel pengelolaan dana BOK (Y) adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t 4,622 > t tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara persial, variabel akuntabilitas (X1) diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap Y. Nilai sig untuk pengaruh variabel transparansi (X2) terhadap variabel pengelolaan dana BOK (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,383 > t tabel 1,988 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara persial variabel transparansi (X2) diterima yang berarti terdapat

pengaruh terhadap variabel pengelolaan dana BOK (Y).

**Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan di atas bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Akuntabilitas berpengaruh besar terhadap pengelolaan dana BOK karena akuntabilitas dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dicapai dengan cara yang tepat,

ketika suatu organisasi bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka, maka mereka lebih cenderung untuk mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang mereka lakukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pernyataan dari akuntabilitas yang paling tinggi yaitu kehadiran sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dipuskesmas dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOK. Akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana BOK dapat membangun kepercayaan publik, ketika masyarakat melihat bahwa dana BOK digunakan secara transparan, efisien, dan efektif kepercayaan mereka terhadap sistem kesehatan dan pemerintah meningkat. Akuntabilitas membantu dalam pengendalian keuangan yang baik dalam pengelolaan dana BOK, dengan adanya pencatatan yang akurat dan pelaporan yang tepat waktu pengelolaan dapat membantu arus masuk dan keluar dana secara sistematis. Hal ini membantu dalam mengelola anggaran BOK digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan pengelolaan dana BOK dapat menjelaskan bagaimana dana tersebut digunakan dan hasil yang dicapai pertanggungjawaban ini membangun integritas dalam pengelolaan dana BOK. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahkmawati (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Ammar dan Bustamam (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Serta menurut (Rachman, 2022) bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada SMA SASAMA.

#### *Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)*

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan di atas bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Trisnawati, 2018). Hasil penelitian ini mempunyai arti bahwa transparansi merupakan

faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak puskesmas agar tercapainya pengelolaan dana BOK yang lebih baik lagi. Tingkat transparansi yang baik dapat meningkatkan pengelolaan dana BOK, karena transparansi merupakan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pihak umum atau masyarakat sehingga pihak-pihak yang mengetahui informasi yang diberikan oleh puskesmas dapat mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas. Sebaliknya, apabila pihak puskesmas tidak memiliki tingkat transparansi yang baik maka tidak ada pihak yang ikut mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas dan dikhawatirkan akan timbul resiko penyelewengan penggunaan dana BOK. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan transparansi yang paling tinggi yaitu puskesmas secara berkala melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap kerangka regulasi yang ada untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana BOK. Dengan demikian informasi mengenai transparansi sudah dianggap baik. Penelitian ini juga sejalan dengan Made (2019) transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa dikecamatan abiansemal Kabupaten Bandung. Ammar dan Bustamam (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. dan pada penelitian Rahkmawati (2018) menyatakan bahwa ransparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana BOS.

#### **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan dan parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan BOK pada Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ammar, Faisyal, dan Bustamam. 2019. Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 116-130.

- Dani Rachman, 2022. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA SASAMA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Bale Bandung.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hughes, Owen. E. 2017, *Public Management and Administration*, 2nd Ed., London: MacMillan Press Ltd.
- I Made, Y. D. P. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*.
- Ita Rahkmawati. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparasi Terhadap Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder sebagai variabel moderasi. IAIN Kudus.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021
- Saptawan Hardian. 2018, Efektifitas Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Universitas Sriwijaya.
- Trisnawati, F. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kota Pekanbaru. *Al-Iqtishad*, 1